

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI LUAR  
PENGADILAN**

**(STUDI DI POLRESTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**BRAM DHANANJAYA**

NIM. 105010101111006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Warsito dan Ibu Nunut Supiarsi atas doa dan motivasi yang diberikan.
2. Kakak Arum Sekarini atas motivasinya.
3. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Eni Harjati S.H. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H. M.S. selaku pembimbing utama atas bimbingan dan motivasinya.
6. Bapak Alfons Zakaria S.H. L.LM selaku pembimbing pendamping atas bimbingan dan kesabarannya.
7. Seluruh staf dan karyawan serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
8. Teman-teman PPM 2010 Kelompok 2 atas bantuan dan motivasinya.
9. Teman-teman Ateng, Popo, Dinar, Bade, Sindu atas bantuan dan motivasinya.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
11. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini jauh masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Mei 2014

Penulis

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi :IMPLEMENTASI KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU  
LINTAS DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI POLRESTA MALANG)**

**Identitas Penulis :**

- a. Nama : Bram Dhananjaya
- b. NIM : 105010101111006
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana

**Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, S.H. M.S.

NIP. 196111116 198601 1 001

Alfons Zakaria S.H. L.L.M

NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H. M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001



## HALAMAN PENGESAHAN

### **IMPLEMENTASI KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI POLRESTA MALANG)**

Oleh :  
**BRAM DHANANJAYA**  
**105010101111006**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Nurini Aprilianda, S.H. M.Hum.  
NIP. 19590126 198701 1 001

Anggota

Dr. Prija Djatmika, S.H. M.S.  
NIP. 19611116 198601 1001

Anggota

Dr. Bambang Sugiri, S.H. M.S.  
NIP. 19570717 198403 1 002

Anggota

Abdul Madjid, S.H.M.Hum.  
NIP. 19760429 200212 2 001

Ketua Bagian Hukum  
Pidana

Ardi Ferdian, S.H. M.Kn.  
NIP. 19830930 200912 1003

Eny Harjati, S.H. M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Bagan .....	vi
Ringkasan .....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Kepolisian .....	10
B. Kajian Umum Tentang Penyelesaian Di Luar Pengadilan .....	15
C. Kajian Umum Tentang Diskresi Kepolisian .....	25
D. Kajian Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas .....	32
E. Kajian Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan .....	35
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Metode Pendekatan .....	51
C. Lokasi Penelitian .....	52
D. Jenis dan Sumber Data .....	52
E. Populasi, Sampel dan Responden .....	53
F. Teknik Pengumpulan Data .....	54
G. Teknik Analisis Data .....	55
H. Definisi Operasional .....	56

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

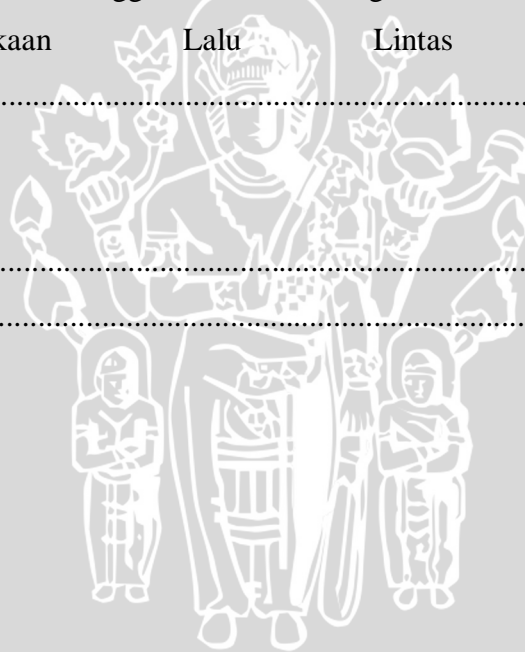
A. Gambaran Umum Polresta Malang .....	58
B. Gambaran Umum Satlantas Polresta Malang .....	66
C. Gambaran Umum Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang .....	70
D. Kriteria Penggunaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan .....	76
E. Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan	
1. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2013.....	81
2. Mekanisme dalam menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan .....	84
3. Faktor Pendorong Penyidik Menggunakan Kewenangan Diskresi dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan.....	89

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN





## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2011 .....	72
Tabel 2. Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2012 .....	73
Tabel 3. Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2013 .....	74
Tabel 4. Jumlah Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2013 .....	82



## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Garis Komando Dari Pusat Sampai Sektor (sebelum) .....	60
Bagan 2. Garis Komando Dari Pusat Sampai Sektor (sesudah) .....	61
Bagan 3. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2011-2013 .....	75
Bagan 4. Jumlah Korban Meninggal Dunia Kecelakaan Lalu Lintas di Poresta Malang Tahun 2011-2013 .....	75
Bagan 5. Jumlah Korban Luka Berat Kecelakaan Lalu Lintas di Poresta Malang Tahun 2011-2013 .....	76
Bagan 6. Jumlah Korban Luka Ringan Kecelakaan Lalu Lintas di Poresta Malang Tahun 2011-2013 .....	77
Bagan 7. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2013 .....	83
Bagan 8. Jumlah Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan (ADR) Berdasarkan Kriteria Korban Tahun 2013 .....	84





## RINGKASAN

Bram Dhananjaya, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, IMPLEMENTASI KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI POLRESTA MALANG), Dr. Prija Djatmika, SH. MS, Alfons Zakaria, SH. LLM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan (Studi di Polresta Malang). Hal ini dilatarbelakangi dengan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kota Malang baik yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan. Anggota Polresta Malang dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tidak jarang menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan sebagai perwujudan dari diskresi kepolisian. Ada kriteria-kriteria tertentu penggunaan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan. Penelitian ini disusun untuk mengetahui dan menganalisis kriteria kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dan implementasinya di Polresta Malang.

Dalam upaya mengetahui lebih lanjut kriteria kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dan implementasinya di Polresta Malang, maka digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian mengidentifikasi masalah, dan pada akhirnya memperoleh penyelesaian masalah. Hasil data penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa anggota Polresta Malang dalam menggunakan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan berdasarkan dua kriteria, yaitu : Kecelakaan lalu lintas tersebut bukan merupakan tindak pidana kesengajaan serta adanya itikad baik dari pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang diwujudkan dalam surat kesepakatan perdamaian. Implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan di luar pengadilan di Polresta Malang diwujudkan dengan diselesaikannya 140 perkara dari 222 perkara kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian / jalur di luar pengadilan, ada dua mekanisme untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan yaitu sebelum diterbitkan laporan kepolisian dan sesudah diterbitkan laporan kepolisian, serta adanya faktor-faktor pendorong anggota kepolisian untuk menggunakan kewenangan diskresi dari

internal kepolisian yaitu adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dan instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan serta faktor eksternal kepolisian yaitu dukungan dari tokoh masyarakat setempat dan budaya dari tempat tinggal korban untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan.





## SUMMARY

Bram Dhananjaya , Criminal Law , Faculty of Law, University of Brawijaya , April 2014 , IMPLEMENTATION COMPLETION OF POLICE AUTHORITY DISCRETION TRAFFIC ACCIDENT CASE OUT OF COURT ( STUDY IN Police MALANG ), Dr. Prija Djatmika, S.H. M.S, Alfons Zakaria, S.H. L.LM .

In writing this paper the author discusses the implementation of the Authority Discretion in the Police Traffic Accident Settlement Case Out of Court ( Studies in Malang Police ) . This is motivated by the high number of traffic accidents , especially in Malang both resulting in fatalities , serious injuries and minor injuries . Malang Police members in resolving cases of traffic accidents is not uncommon to use an out of court settlement as the embodiment of police discretion . There are certain criteria for the use of police discretion in resolving traffic accident case out of court . This research is compiled and analyzed to determine the criteria for the use of police discretionary authority in a traffic accident settlement out of court and its implementation in Malang Police .

In an effort to find out more criteria in the use of police discretionary authority in a traffic accident settlement out of court and its implementation in Malang Police , the method used socio-juridical approach . Research conducted on the real situation in the community with the intent and purpose to find the facts and then identify the problem , and ultimately acquire problem solving . The results of the research data is processed and analyzed by descriptive analysis .

Based on the results of the study , the authors obtained the answer of existing problems that members of the Police Malang in using discretionary authority in a traffic accident settlement out of court based on two criteria , namely : there is no element of intent in the case of the crash and the presence of good faith on the part of the perpetrator and menyelesaikan victim to the case outside the court in a letter that embodied peace agreement . Implementation of discretionary police authority in settling disputes out of court accident in Malang Police realized with the completion of 140 cases from 222 cases of traffic accidents through peace / lane outside the court , there are two mechanisms to settle cases out of court that the accident before the police report was published and after published police reports , as well as the factors driving police officers to use the discretionary authority of the internal police regulation that ensures that the actions of police discretion and instruction from party leaders to resolve an accident case out of court and police external factors , namely the support of local community leaders and culture of the victim's residence to settle accident case out of court.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan sejalan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.

Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Malang masih cukup tinggi. Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2012 sebanyak 316 kasus, sementara untuk tahun 2013 sebanyak 222 kasus. Sedangkan korban yang meninggal dunia pada tahun 2012 sebanyak 77 orang, sementara tahun 2013 sebanyak 70 orang.<sup>1</sup> Dari data tersebut masih menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta beberapa tindakan operasi seperti operasi zebra oleh pihak kepolisian namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2011, kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan

---

<sup>1</sup> Data Hasil Pra Survei di Sat Lantas Polresta Malang, 2 November 2013

penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia setelah penyakit jantung dan tuberculosi (TBC).<sup>2</sup>

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari masih banyak pengemudi yang belum siap terutama secara mental untuk turun ke jalan. Sebenarnya kecelakaan lalu lintas dapat dihindari jika pengemudi tertib, disiplin dan saling menghormati dengan sesama pengguna jalan. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam bab IV telah mengatur tata cara berlalu lintas yang pada paragraf 1 pasal 105 dan pasal 106 menyebutkan bahwa :

#### Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

#### Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. gerakan Lalu Lintas;
  - e. berhenti dan Parkir;
  - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. tata cara pengendalian dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. Surat Izin Mengemudi;
  - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau

---

<sup>2</sup>D-13, 2013, **Kecelakaan Penyebab Kematian Ketiga Terbesar di Indonesia**(online), <http://www.beritasatu.com/nasional/100328-kecelakaan-penyebab-kematian-ketiga-terbesar-di-indonesia.html>, (21 September 2013)



- d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk,keselamatan.
  - (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasiona Indonesia.
  - (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
  - (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Dalam sebuah perkara pidana, khususnya menyangkut tentang lalu lintas, sanksi pidana dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, mulai tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Menurut pandangan teori utilitarisme atau konsekuensialisme dalam Teori Etika tentang Hukuman Legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Sebaliknya, berdasarkan pandangan sebagian masyarakat, bila terjadi suatu tindak pidana maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas upaya damai kepada korban dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi secara materiil berupa uang kerahiman oleh pelaku maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hukum kebiasaan sering kali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Iswanto berpendapat bahwa penyelesaian secara damai perkara tindak pidana kecelakaan lalu

---

<sup>3</sup> Yong Ohoitimur, **Teori Etika Tentang Hukuman Legal**, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1997, hlm 24.



lintas yang berakibat mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima secara damai antara pembuat dengan korban atau keluarga korban.<sup>4</sup>

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efektif dan efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggarnya, namun kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta

---

<sup>4</sup> Iswanto, **Penyelesaian Damai Perkara Lalu – Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana**, Yogya Post, 5 November 2005.

sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.

Djoko Prakoso berpendapat bahwa tindakan polri yang menggunakan asas kewajiban berdasar yurisprudensi sampai saat ini belum dijumpai di Indonesia, selama ini yurisprudensi sebagai landasan hukum bagi wewenang polri berdasarkan asas kewajiban hanya diperoleh dari Arrest Hoge Raad pada tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan *rechtmatig* (sah sesuai hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang-undang.<sup>5</sup> Dengan demikian perbuatan tindakan polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan sah sesuai hukum meskipun tidak ada dasar hukumnya.

Berdasarkan uraian dan fakta diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan”**, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja yang menjadi kriteria penggunaan kewenangan diskresi oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan?
2. Bagaimana implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan?

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, **Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 23.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria penggunaan kewenangan diskresi oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Mahasiswa**

Sebagai bahan pengetahuan mahasiswa dan sarana memperluas ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana;

##### **b. Bagi Kepolisian**

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penggunaan kewenangan diskresi pada perkara kecelakaan lalu lintas;

##### **c. Bagi Masyarakat**

Memberikan kesadaran dan bahan masukan bahwa ada penyelesaian hukum diluar pengadilan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas demi rasa keadilan.

##### **d. Bagi para penentu dan pembuat peraturan**



Sebagai bahan tambahan dan sumber pemikiran dalam membuat peraturan, khususnya dalam hal kewenangan diskresi kepolisian pada perkara kecelakaan lalu lintas;

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi tulisan menjadi lima bab guna lebih memperjelas secara detail tentang ruang lingkup dan cangkupan permasalahan yang dikaji. Adapun urutan masing-masing bab beserta penjelasannya adalah sebagai berikut.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan secara terperinci mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan kajian yuridis yang digunakan dalam hubungannya dengan masalah yang akan dibahas pada bab pembahasan. Teori-teori yang disajikan dalam bab ini merupakan dasar yang digunakan dalam analisis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik memperoleh data dan teknik analisis data, serta diakhiri dengan definisi operasional.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan terkait permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.<sup>6</sup> Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>7</sup>

Pada jaman Belanda istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja. Van Vollenhallen membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu: Bestuur, Politie, Rechtpreek dan Rageling. Kepolisian dalam hal ini telah dipisahkan dari bestuur yang merupakan organ dari pemerintahan. Kepolisian termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan secara pasif terhadap

<sup>6</sup> Andi Munwarman. **Sejarah singkat POLRI**. <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal (27 April 2013)

<sup>7</sup> W.J.S. Purwodarminto. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta, 1986, hlm 763.



pelaksanaan kewajiban-kewajiban publik warga negara dan menyidik secara aktif terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban publik para warga negaranya.<sup>8</sup>

## 2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian mempunyai tugas pokok lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok kepolisian selaku alat penegak hukum diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, adalah sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran dan kepolisian laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian, serta

<sup>8</sup> Van Vollenhallen dalam Warsito Hadi Utomo, **Hukum Kepolisian di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, jakarta 2005 hlm 5

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, kepolisian diberi kewenangan yang diatur dalam undang-undang Kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia wewenang POLRI dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu : wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya diatur dalam Pasal 15 ayat (2), serta wewenang dibidang proses pidana diatur dalam Pasal 16.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang Undang No. 2 tahun 2002, secara umum POLRI mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan peraturan di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin / atau surat keterangan yang diperlakukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan izin dan mengawasi keramaian umum dan kegiatan masyarakat;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;



5. Memberikan surat izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan tugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyingkink dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang beradanya di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang POLRI dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan.

Kepolisian juga memiliki fungsi yang diatur dalam pasal 2 undang-undang Kepolisian. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi sebagai salah satu penegak hukum, kepolisian harus memahami asas-asas yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Asas-asas tersebut antara lain<sup>9</sup> :

---

<sup>9</sup> Bisri Ilham, **Sistem Hukum Indonesia**, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 32.



- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

## **B. Kajian Umum tentang Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan**

### **1. Pengertian Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan**

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*", ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Resolution*". Dalam UU no 30 tahun 1999 pasal 1 angka 10 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini

muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu yang lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.<sup>10</sup>

## 2. Macam-macam bentuk penyelesaian di luar pengadilan

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:

### a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.<sup>11</sup> Di dalam konsultasi, klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternative penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan

<sup>10</sup> Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm 67.

<sup>11</sup> Frans Hendra Winarta. **Hukum Penyelesaian Sengketa**. Sinar Grafika. Jakarta, 2012, Hlm 7

juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

### **b. Negosiasi**

Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu:

- 1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa);
- 2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- 2) Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- 3) Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- 4) Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- 5) Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.

### **c. Penilaian Ahli**

<sup>12</sup> Suyud Margono, **ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000. hlm. 5



Penilaian para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Penilaian ahli merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan.<sup>13</sup>

Penilaian ahli juga dinamakan sebagai keterangan ahli, yang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 angka 28 dirumuskan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan di luar forum pengadilan. Bentuk penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan tersebut di atas dikelompokkan sebagai penyelesaian sengketa secara hukum. Terlepas dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli merupakan upaya-upaya yang ditempuh berdasarkan perdamaian. Bukan menggunakan kekerasan, dan perdamaian ditempuh secara musyawarah untuk mufakat

#### **d. Konsiliasi**

Seperti halnya mediasi, konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang

---

<sup>13</sup>Frans Hendra Winarta, *op cit*

netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator.<sup>14</sup> Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

#### e. Mediasi

##### 1) Pengertian Mediasi Penal

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi pada umumnya digunakan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dalam kasus perdata, namun seiring perkembangan waktu, mulai dikenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui bentuk mediasi penal.<sup>15</sup>

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek praktek. Mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian damai peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari peningkatan jumlah volume perkara dan segala bentuk maupun variasinya yang

<sup>14</sup> Ibid hlm 9

<sup>15</sup> Arief, Barda Nawawi, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 16

masuk ke pengadilan sehingga konsekwensinya menjadi bebas bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, oleh karenanya mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “Victim Offender Mediation” (VOM), Täter Opfer Ausgleich (TOA), atau *Offender victim Arrangement (OVA)*.<sup>16</sup>

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Sebagai contoh dalam hal tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan. Selain itu dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 5, batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada

---

<sup>16</sup>Ibid, hlm 18



Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi.

## 2) Model-model Mediasi penal

Dalam “*Explanatory Memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:<sup>17</sup>

### a) Model “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

### b) Model “*Traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

### c) Model “*victim offender mediation*”

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediasi ini dapat diadakan pada

<sup>17</sup>New York State Dispute Resolution Association, Inc., “**Alternative Dispute Resolution in New York State**”, [http://www.ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr\\_pol\\_en.html](http://www.ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_pol_en.html), (11 Desember 2013)

setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal kecelakaan lalu lintas, perampokan dan tindak kekerasan).

d) Model "*Reparation negotiation programmes*"

Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e) Model "*Community panels or courts*"

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f) Model "*Family and community group conferences*"

Model ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan di muka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban) serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Pada akhirnya dalam konsep rancangan KUHP pasal 145 disebutkan bahwa salah satu kewenangan penuntutan gugur jika telah adanya “penyelesaian di luar proses” meskipun pengaturan rincinya belum ada, namun tentunya akan diatur lebih lanjut di dalam Rancangan KUHP.

### 3) Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi menjadi tiga tahap yang harus dijalankan oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan perkara mereka. Ketiga tahap tersebut adalah:<sup>18</sup>

#### a) Tahap Pramediasi

Tahap Pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Pada tahap ini mediator menghubungi para pihak, menggali informasi awal mediasi, mengkoordinir pihak bertikai, memanggil siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat pertemuan serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak.

#### b) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang berperkara sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Para pihak

<sup>18</sup> Arief Barda Nawawi. **Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan**, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm 36



dibantu dengan mediator berdiskusi dan negoisasi terkait dengan perkara mereka, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan.

#### c) Tahap Akhir Penerapan Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana pihak-pihak yang berperkara menjalankan hasil-hasil kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan kesepakatan berdasarkan komitmen yang mereka tunjukkan dalam proses mediasi.

### C. Kajian Umum Tentang Diskresi Kepolisian

#### 1. Pengertian Diskresi

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>19</sup>

Indarti Erlyn mendefinisikan diskresi sebagai kemerdekaan dan atau otoritas/kewenangan untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat/ sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan,<sup>20</sup> sedangkan Djoko Prakoso menerjemahkan *discreation* sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dinyatakan bahwa pengertian diskresi itu mencakup kewenangan yang bersifat merdeka untuk mengambil keputusan yang tepat/

<sup>19</sup>Puspa Yan Pramadya, **Kamus Hukum**. Aneka Ilmu, Semarang, 1997. hlm 84

<sup>20</sup>Indarti Erlyn. **Diskresi Polisi**, Badan Penerbit Undip. Semarang, 2002. hlm 120

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, *op. Cit*, hlm 181

sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, tidak hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.

## 2. Pengaturan Diskresi Kepolisian

Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari asas kewajiban (salah satu asas yang melandasi penggunaan wewenang polri dalam menjalankan tugas). Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban.

Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam

kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam tugas- tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan Diskresi Kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam system hukum di Indonesia dikenal 4 ( empat ) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan- kebiasaan.

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

Artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

Artinya dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.

<sup>22</sup> M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm 74-75



d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

Artinya pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu (emergencies) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.

e. Menghormati HAM

Artinya sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

### 3. Ruang Lingkup Diskresi Kepolisian

Tindakan diskresi kepolisian dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Penggunaan hukum adat setempat dinilai lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku;
- b. Alternatif penyelesaian perkara selain melalui mekanisme hukum lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat;
- c. Kebijakan lain yang ditempuh dapat lebih memberikan rasa keadilan daripada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada;
- d. Atas kehendak mereka sendiri dan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak;
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- f. Pelaku masih dibawah umur atau anak-anak dan kerugian yang ditimbulkan sangat kecil;
- g. Permasalahan tersebut belum ada hukum yang mengaturnya.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 78

Tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan kepada pertimbangan pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Selain pertimbangan tersebut, anggota kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresi harus mempertimbangkan secara objektif dan bertanggung jawab. Faal menambahkan ditinjau dari sudut penilaian petugas, maka petugas mengukur dan mempertimbangkan tindak pidana itu.<sup>25</sup>

- a. Sampai sejauh mana kadar hukum yang dilanggar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan-ringan saja.
- b. Bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak tertulis terhadap pelanggaran atau kejahatan tersebut.
- c. Sampai dimana sikap dan rasa hormat tersangka terhadap petugas. Jika tersangka bersikap tidak simpatik, keras kepala, maka dapat mempengaruhi anggota kepolisian dalam menggunakan diskresinya.
- d. Anggota kepolisian selalu memikirkan dampak keamanan bagi dirinya, orang lain maupun masyarakat berdasarkan hasil diskresi yang digunakannya.

Mengingat kewenangan diskresi kepolisian yang sangat luas, maka diperlukan batasan-batasan yang harus ditaati oleh anggota kepolisian. Hal tersebut diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian mengingat diskresi merupakan pertimbangan subjektif dari polisi sendiri.

<sup>24</sup> Raharjo, Sajipto & Tabah Anton, **Polisi Pelaku dan Pemikir**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm 112

<sup>25</sup> M. Faal, *op cit*, hlm 104

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang anggota kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresi, maka tindakan diskresi dibatasi oleh <sup>26</sup>:

- a. Asas Keperluan, bahwa tindakan tersebut harus benar-benar diperlukan
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan suatu objek yang harus ditindak.

#### **D. Kajian tentang Kecelakaan Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut Pasal 1 ayat (24) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 menentukan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pasal 229 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

<sup>26</sup> Mabes Polri, **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan**, Jakarta, 2002, hlm 132.



- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Secara umum faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dibagi dalam tiga macam, yaitu:<sup>27</sup>

### a. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar terjadinya kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas oleh pengemudi. Pelanggaran dapat terjadi karena kesengajaan pengemudi maupun ketidaktahuan arti rambu-rambu tersebut.

### b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah pecah ban, rem tidak berfungsi, kelelahan logam akibat bagian kendaraan patah, maupun peralatan yang aus dan tidak segera diganti. Pengemudi seringkali mengabaikan kondisi kendaraan dan tidak memperbaiki kendaraan secara teratur sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

### c. Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, median jalan serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas terutama pengemudi motor roda dua.

## 3. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI yang dikutip oleh Kartika dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Kartika, M. 2009. **Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Pada Pengemudi Sepeda Motor di Wilayah Depok Tahun 2008**. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia : Jakarta. Diakses melalui [www.digilib.ui.ac.id](http://www.digilib.ui.ac.id) pada tanggal 11 Desember 2013 jam 16.35

- a. *Angle* (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
- b. *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
- c. *Sideswape* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
- d. *Head-On* (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswape).
- e. *Backing*, tabrakan secara mundur.

#### 4. Kriteria Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Kriteria korban kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT Jasa Marga adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Meninggal, adalah keadaan dimana pada penderita terdapat tanda – tanda kematian fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal di lokasi kejadian atau meninggal selama perjalanan ke rumah sakit.
- b. Luka berat, adalah keadaan korban mengalami luka – luka yang dapat membahayakan jiwanya dan memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut dengan segera di rumah sakit, terdiri dari :
  - 1) Luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya luka mengenai kepala atau batang kepala
  - 2) Luka bakar yang luasnya meliputi 25% dengan luka baru
  - 3) Patah tulang anggota badan dengan komplikasi disertai rasa nyeri yang hebat dan pendarahan hebat
  - 4) Pendarahan hebat kurang lebih 500 cc

<sup>28</sup> ibid

<sup>29</sup> Setijowarno D, Frazila R.B, **Pengantar Sistem Transportasi**, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2001. Hlm 45



5) Benturan / luka yang mengenai badan penderita yang menyebabkan kerusakan alat – alat dalam, misalnya dada, perut, usus, kandung kemih, ginjal, limpa, hati, tulang belakang dan batang kepala

c. Luka ringan, adalah keadaan korban mengalami luka – luka yang tidak membahayakan jiwa dan atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit, terdiri dari:

- 1) Luka kecil di daerah kecil dengan pendarahan sedikit dan penderita sadar
- 2) Luka bakar dengan luasnya kurang dari 15%
- 3) Keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi

## **E. Kajian Umum Penyelidikan dan Penyidikan**

### **1. Penyelidikan**

#### **a. Pengertian Penyelidikan**

Penyelidikan ialah cara atau metode aparat hukum yang ditugaskan sebagai penyidik untuk memperoleh penerangan dalam sebuah perkara yang masih prakira sebelum dilakukannya penyidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sebelum KUHAP berlaku, *opspornig* atau dalam istilah Inggris disebut sebagai *investigation* merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak



pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan atau penyelidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.<sup>30</sup>

### **b. Pengertian Penyelidik**

Dalam pasal 1 angka 4 KUHAP menjelaskan bahwa orang yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya dan tidak lagi dibenarkan adanya campur tangan dari instansi atau pejabat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tindakan penyelidikan sebuah peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk<sup>31</sup> :

- 1) Menyederhanakan dan memberi wewenang kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- 2) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih;
- 3) Efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan.

### **c. Fungsi dan Wewenang Penyelidik**

Fungsi dan wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang berbunyi :

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Pustaka Kartini, Jakarta, 2006, hlm 99.

<sup>31</sup> Ibid hal. 103

1. Karena kewajiban atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Mencari keterangan dan bukti
  - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

## 2. Penyidikan

### a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan. Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut R. Soesilo, dalam bidang reserse kriminal penyidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :<sup>32</sup>

#### 1) Penyidikan dalam arti luas

Penyidikan meliputi penyelidikan, pengusutan, dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang terus menerus, tidak ada pangkal dan permulaannya.

#### 2) Penyidikan dalam arti sempit

Penyidikan yaitu tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm 17



Perbedaan yang mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan adalah jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedang dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>33</sup> Tugas selanjutnya aparat hukum menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.<sup>34</sup>

#### **b. Pengertian Penyidik**

Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepolisian menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 6 KUHAP, penyidik dibedakan menjadi dua, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yaitu<sup>35</sup>:

##### **1) Pejabat Penyidik Polisi**

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan

<sup>33</sup> R. Wiyono, **Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 36.

<sup>34</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, **Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 36

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, **op cit**. Hlm 107



pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam BAB 2 PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

a) Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:

Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) diangkat oleh Kepala Kepolisian atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang

yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil:<sup>36</sup>

- a) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri, dan di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b) Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan
- c) Penyidik pegawai negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya
- d) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri
- e) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

### **c. Wewenang Penyidik**

Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>36</sup> ibid



#### d. Penghentian Penyidikan

Kepolisian dalam melakukan penyidikan tidak menutup kemungkinan menemukan kesulitan sehingga tidak mungkin melakukan penyidikan secara lanjut. Dalam situasi dan kondisi demikian, KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan dalam persidangan jika ada pihak yang mengajukan praperadilan.

Alasan penghentian penyidikan yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Alasan penghentian penyidikan lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>37</sup>

##### 1) Karena tidak cukup bukti

Penyidik mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan ketika tidak memperoleh cukup bukti untuk menjerat tersangka dan membuktikan kesalahan tersangka di depan persidangan. Cukup atau tidaknya bukti dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya minimal dua alat bukti dan dari alat bukti itu ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.” Sedangkan menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa yang dinamakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

##### 2) Karena bukan merupakan tindak pidana

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 151



Penyidik yang telah melakukan penyidikan dan ternyata terungkap fakta-fakta bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana, maka penyidik harus menghentikan penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa bukan merupakan perkara pidana, penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan alat bukti lain yang mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut adalah perkara pidana.

3) Penyidikan dihentikan demi hukum

Penyidikan dihentikan demi hukum dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, yaitu :

- a) *Nebis in idem*, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pengadilan.
- b) Dalam hal telah terjadi suatu delik aduan tidak diajukan pengaduan. Jika orang yang bersangkutan atau korban dalam tindak pidana aduan tidak mengajukan pengaduan, maka penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan.
- c) Daluarsa, setelah melewati tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa. Dengan gugurnya hak menuntut pidana maka tidak ada alasan lagi kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.
- d) Tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia. Jika tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia, maka kesalahan tidak dapat diwariskan

kepada ahli warisnya. Sehingga jika saat penyidikan tersangka meninggal dunia, maka penyidikan harus dihentikan sesuai dengan pasal 83 KUHP.

- e) Tersangka menderita sakit jiwa atau terganggu karena penyakit tidak dapat di pidana, dalam hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP. Penghentian penyidikan dengan alasan hukum ini tidak dapat dilakukan penyidikan ulang, kecuali ternyata terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa keadaan tersebut rekayasa pelaku.

### 3. Upaya Paksa Penyidik

Upaya paksa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat, penggeledahan dengan maksud untuk mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Jenis upaya paksa penyidik sebagai berikut :<sup>38</sup>

#### a. Penangkapan

Penangkapan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 20 adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP.<sup>39</sup>

Penangkapan sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 KUHP bahwa baik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan atau untuk melakukan penangkapan. Tata cara pelaksanaan penangkapan adalah dengan memperlihatkan surat tugas petugas Kepolisian

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 119



Negara Republik Indonesia serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Apabila penangkapan dilakukan segera pada saat terjadi suatu kejahatan atau dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tata cara pelaksanaan penangkapan adalah dengan memperlihatkan surat tugas petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memberikan kepada tersangka surat perintah pengkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Apabila penangkapan dilakukan segera pada saat terjadi suatu kejahatan atau dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

#### b. Penahanan

Penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau



hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan suatu penyidikan. Penahanan dapat juga dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan maupun oleh Hakim itu sendiri di sidang Pengadilan dengan penetapannya.<sup>40</sup>

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan bilamana terdapat kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

KUHAP menyebutkan bahwa suatu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- 1) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika

<sup>40</sup> Ibid, hlm 129

(Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086).

c. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

Penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan melalui mekanisme sebagai berikut :<sup>41</sup>

- 1) Dengan membawa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- 2) Setiap memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- 4) Dalam waktu dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 37 KUHAP menyebutkan:

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.”

d. Penyitaan

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm 142

Penyitaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam Pasal 134 Ned. Sv. juga diberikan definisi penyitaan (inbeslagneming) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Dengan penyitaan suatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana. Jadi tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.<sup>42</sup>

Suatu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun demikian, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yakni bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik tersebut dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak.

Hal-hal yang menjadi obyek penyitaan adalah:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pemeriksaan Surat

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 147



Pemeriksaan surat diatur dalam pasal 47 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan izin khusus yang diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau kepala perusahaan komunikasi untuk menyerahkan surat yang dimaksud dengan diberikan surat tanda penerimaan.

Jika sesudah dibuka dan diperiksa ternyata isi surat berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Namun ketika sudah dibuka dan diperiksa ternyata surat tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan, maka surat tersebut ditutup rapi dan dikembalikan setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan serta identitas penyidik.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang pembahasannya berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan, semua hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian masalah.<sup>43</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kajian secara mendalam mengenai kewenangan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan di Kepolisian Resor Kota Malang.

##### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan metode Yuridis Sosiologis, yaitu meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas peraturan-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat.<sup>44</sup> Hal ini disebabkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Dalam penelitian ini metode yuridis sosiologis dilakukan untuk memahami kriteria perkara dan penerapan kewenangan diskresi oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji suatu permasalahan hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pembahasan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari lapangan serta

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 73

<sup>44</sup> Ibid hlm.74

semua hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, kemudian dibahas dan dianalisis untuk menemukan pemecahan atau pemecahan masalah.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Malang karena Kepolisian Resort Kota Malang merupakan suatu lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan menggunakan diskresi pada tahap penyidikan serta berdasarkan pertimbangan bahwa dari 222 perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013, 140 perkara kecelakaan lalu lintas atau lebih dari 63% yang diselesaikan dengan menggunakan diskresi kepolisian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.<sup>45</sup>

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini :

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.<sup>46</sup> Dalam hal ini yaitu tentang realita penggunaan kewenangan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dalam lingkup Polresta Malang. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan penyidik kepolisian Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polresta Malang yang menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.
2. Data Sekunder merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu cara

<sup>45</sup> Data Hasil Pra Survey di Polresta Malang, 3 November 2013

<sup>46</sup> Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12



memperoleh data menggunakan sumber tertulis, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.<sup>47</sup> Sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## E. Populasi, Sampel dan Responden

### 1. Populasi

Populasi (*universe*) yaitu keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>48</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Resort Kota Malang.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.<sup>49</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada metode *purposive sampling* (berdasarkan tujuan penelitian) yaitu dengan cara mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan waki representatif. Artinya subyek sampel yang diambil anggota sampel sedemikian rupa tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang akurat.<sup>50</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik Satlantas Polresta Malang.

### 3. Responden

Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik peranyaan tertulis maupun lisan.<sup>51</sup> Untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan penelitian, diambil tiga responden yang terkait

<sup>47</sup> Ibid hlm. 13

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid I**, Andi Offset, Yogyakarta, 1981, hal 70

<sup>49</sup> ibid

<sup>50</sup> Romi Hanitijito, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 71.

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, **Manajemen Penelitian**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 10

dengan permasalahan yang diajukan, yaitu Kepala Unit Laka Lantas Polresta Malang Rudy Hidajanto serta dua orang anggota Unit Laka Lantas Polresta Malang Teddy Harianto dan Edward Rudolf.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

### 1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri suaranya. Dalam melakukan penelitian ini digunakan wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terpimpin yang disebut juga wawancara terarah atau *directive interview*.<sup>52</sup> Maksudnya adalah dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya variasi-variasi pertanyaan ketika wawancara dilakukan. Dengan teknik ini, unsur kebebasan masih dilakukan.<sup>53</sup> Wawancara dilakukan dengan Kepala Unit Laka Lantas Polresta Malang dan dua anggota Unit Laka Lantas Polresta Malang.

### 2. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh dengan cara membaca buku-buku literatur yang ada, perundang-undangan, internet, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu terkait dengan kewenangan diskresi kepolisian, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan serta tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dengan menggunakan studi kepustakaan ini akan diperoleh

<sup>52</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 57.

<sup>53</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 73.



manfaat teori-teori yang bersifat umum dan berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan metode diskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>54</sup> Selanjutnya penulis melakukan analisis dari semua data baik data primer maupun data sekunder yang kemudian data-data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitanya, berdasarkan data yang diperolehakan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan.

### H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang serta perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
2. Diskresi adalah kebijaksanaan kepolisian dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri.

<sup>54</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25.



3. Penyelesaian Diluar Pengadilan adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.
4. Kecelakaan lalu lintas adalah adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Polresta Malang

Polresta Malang merupakan institusi kepolisian yang memiliki wilayah yuridiksi seluruh wilayah kota Malang yang sebelumnya bernama Kota Madya Malang dengan membawahi Kepolisian-kepolisian Sektor (Polsek) yang ada di kota Malang, serta berada di bawah pengawasan Kepolisian Wilayah Malang (Polwil Malang). Kepolisian Wilayah Malang merupakan institusi Kepolisian yang memiliki wilayah yuridiksi seluruh eks-karisidenan Malang yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah kota dan kabupaten Malang, kota dan kabupaten Pasuruan, kota dan kabupaten Probolinggo, kota dan kabupaten Lumajang, dan kota Batu.

Selain itu Kepolisian Wilayah Malang sendiri berada dibawah pengawasan institusi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang memiliki wilayah yuridiksi seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Seluruh institusi kepolisian yang berada di daerah atau provinsi mulai tingkat Kepolisian daerah hingga tingkat Kepolisian sektor berada dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Hal tersebut digambarkan pada bagian dibawah ini:

## Bagan 1

Garis Komando Dari Pusat Sampai Sektor  
(sebelum)



*Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014*

Pada tahun 2008, terjadi perubahan dalam struktur Kepolisian terutama dalam hierarki (tingkatan) kewenangan Kepolisian yang ada di daerah, khususnya yang berada di wilayah yuridiksi Kepolisian Wilayah Jawa Timur.

Perubahan tersebut ditandai dengan dilikuidasinya Kepolisian Wilayah yang berada di Jawa Timur khususnya Kepolisian Wilayah Malang. Hal tersebut membuat berubahnya level status atau kewenangan yang ada di daerah yuridiksi Kepolisian Wilayah Jawa Timur khususnya mengenai pertanggungjawaban Kepolisian Resor



Malang yang dulu berada di bawah kewenangan Kepolisian Wilayah Malang, maka setelah tidak adanya Kepolisian Wilayah Malang pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Malang langsung kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Hal tersebut digambarkan pada bagan sebagai berikut :

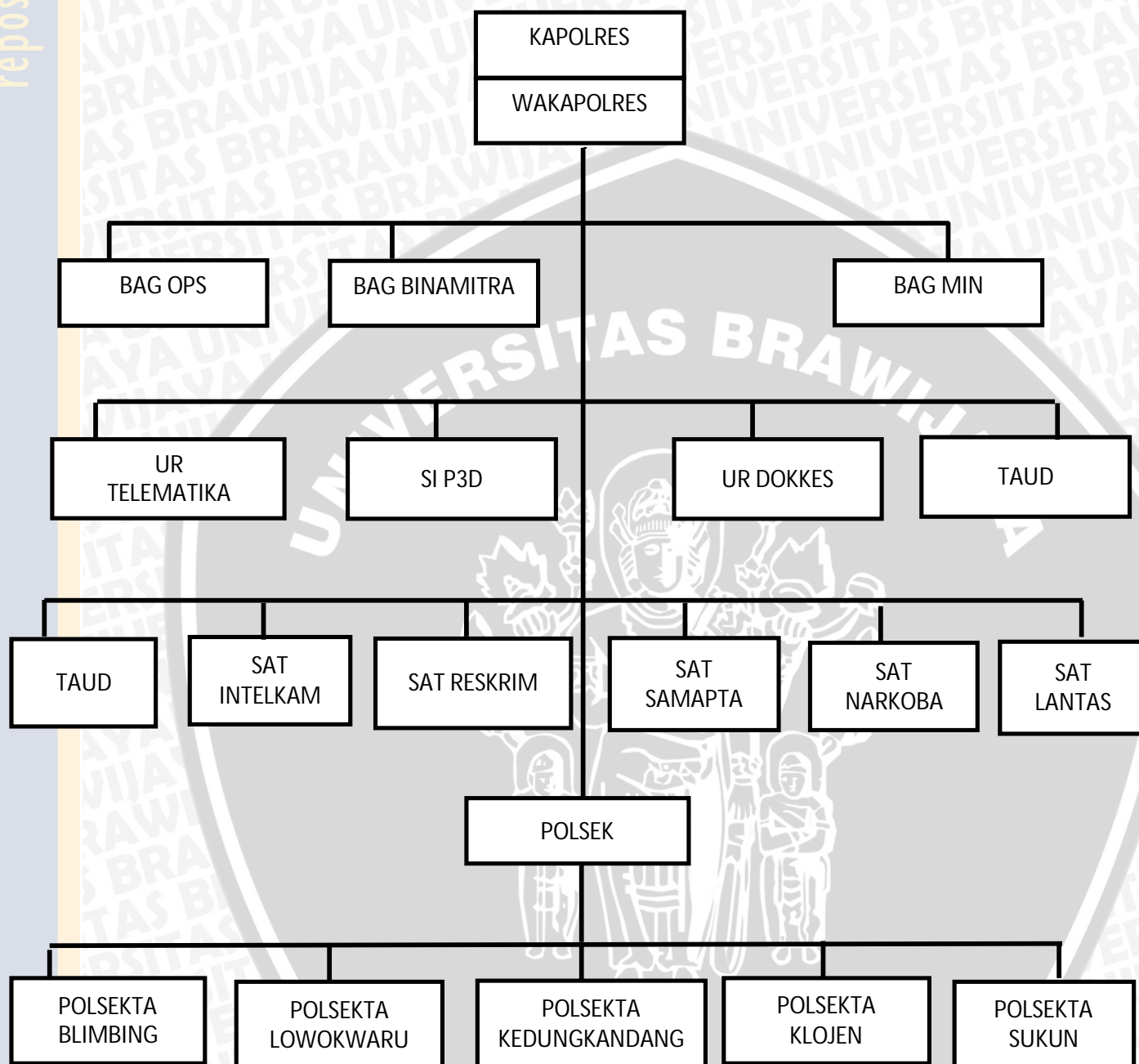
Bagan 2  
Garis Komando POLRI Pusat Sampai Sektor  
(sesudah)



*Sumber : Data Sekunder, diolah, 2014*

Polresta Malang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto no. 19 Malang, yang terletak di depan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Polresta Malang saat ini memiliki 5 (lima) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) yang menjadi tanggung jawabnya. Kelima Polsekta tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedungkandang dan Polsekta Belimbing. Sebagai sebuah institusi maka Polresta Malang memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan fungsi

masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Polresta Malang dapat digambarkan sebagai berikut :



*Sumber : Data sekunder, diolah, 2014*

Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Polresta Malang tersebut sebagai berikut:<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Data yang diperoleh dari Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam Polresta Malang, 3 Januari 2014

1. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) : Kapolres bertugas memimpin, membina, dan mengawasi/ mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) : Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bagian Operasional : Bagian operasional bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan pelayanan perlindungan saksi/ korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bagian Pembinaan Kemitraan : Bagian Pembinaan Kemitraan bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/ mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan operasi, lembaga/ tokoh sosial/ kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/ PPNS dan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.



5. Bagian Administrasi : Bagian Administrasi bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/ program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personil, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
6. Si Telematika : Seksi telekomunikasi dan elektronika, bertugas memonitor dan mengadakan survei serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan komlak dari masyarakat.
7. Si P3D : Seksi pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin, bertugas menyelenggarakan pelayanan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai pada Polsekta-polsekta yang ada.
8. Urusan Kedokteran dan Kesehatan : Urusan kedokteran dan kesehatan bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personil, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun kerja sama dengan pihak lain,
9. Tata Usaha dan Urusan Dalam : Tata usaha dan urusan dalam bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/ upacara kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/ pemeliharaan kendaraan roda dua maupun roda empat dan urusan persenjataan.
10. Sentra Pelayanan Kepolisian : Sentra pelayanan kepolisian bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/ pengaduan pelayanan permintaan bantuan/ pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/

perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan dalam organisasi Polri.

11. Satuan Intelijen Keamanan : Satuan Intelijen keamanan bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/ politik masyarakat dan Surat Rekaman Keterangan Kejahatan (SRKK/ *Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.
12. Satuan Reserse Kriminal : Satuan Reserse Kriminal bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
13. Satuan Samapta : Satuan Samapta bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi kesamaptaaan kepolisian / tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
14. Satuan Narkotika dan Obat-obatan : Satuan Narkotika dan Obat-obatan bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/ penyalahgunaan narkoba.



15. Satuan Lalu Lintas : Satuan Lalu Lintas bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/ kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Polisi Sektor Kota (Polsekta) : Polisi sektor kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

## **B. Gambaran Umum Satlantas Polresta Malang**

Satlantas Polresta Malang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres Malang Kota. Tugas Pokok Satlantas Polresta Malang antara lain:<sup>56</sup>

1. Menangani kecelakaan lalu lintas;
2. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas);
3. Pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
4. Melakukan TPTKP, olah TKP, penyelidikan, dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.
5. Membantu kepengurusan Jasa Raharja bagi ahli waris atau keluarga korban;
6. Melakukan pendataan angka kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan guna dapatnya mengantisipasi terjadinya kecelakaan;
7. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kecelakaan guna mempercepat penanganan sehingga korban dapat terselamatkan, barang bukti aman dan

---

<sup>56</sup> Data yang diperoleh dari Bagian Tata Usaha Satlantas Polresta Malang, 3 Januari 2014



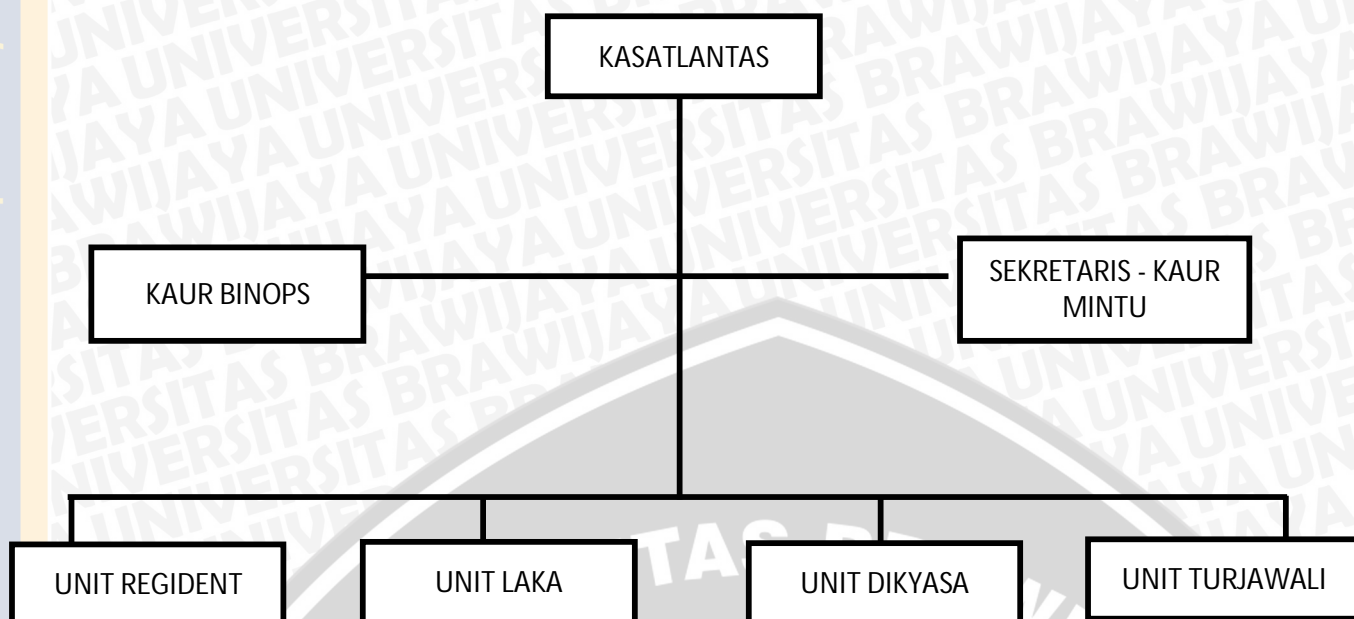
kerusakannya tidak semakin parah, serta mencegah timbulnya permasalahan baru di tempat kejadian perkara;

8. Melaksanakan perintah pimpinan sebagai petunjuk cara bertindak serta memberikan informasi kepada pimpinan sebagai pengawas dan pengendali.

Dalam melaksanakan tugas Satlantas Polresta Malang menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
7. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Adapun Struktur Organisasi Satlantas Polres Malang Kota digambarkan sebagai berikut :



*Sumber : Data Sekunder, diolah, 2014.*

Satlantas Polresta Malang dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres Malang Kota dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres Malang Kota.

Kasatlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:<sup>57</sup>

1. KBO Sat Lantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lantas. KBO lantas membawai tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
2. Kaur Mintu adalah Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan, fan urusan dalam. Kaur Mintu bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.
3. Kanit Regident ( Kepala Unit Registrasi & Identifikasi ) bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-

<sup>57</sup> ibid

hari dibawah kendali Kasat Lantas yang membawahi urusan pelayanan registrasi & identifikasi kendaraan serta pengemudi dan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Unit SIM, Unit STNK dan Unit BPKB.

4. Kanit Patroli Sat Lantas ( Kepala Unit Patroli ) bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur. Kanit Patroli membawahi tentang urusan unit patmor dan unit Gaktur serta administrasi.
5. Kanit Laka Sat lantas ( Kepala Unit Kecelakaan ) yang membawahi tentang urusan pelayanan & penanganan kecelakaan lalu lintas dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka.
6. Kanit Dikyasa Sat Lantas ( Kepala Unit Pendidikan & Rekayasa ) bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.

Visi dan Misi Satlantas Polresta Malang adalah :

1. Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum dalam rangka mendukung upaya pemerintah Kota Malang untuk menjadi kota yang lebih maju dan aman.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.



3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dilingkungan masing-masing.
4. Memelihara kamtibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
5. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat ( *Community Policing* ) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum ( *Law Abiding Citizen* ).
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas dalam jajaran Polres Malang Kota.
8. Mendukung upaya pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan.

### **C. Gambaran Umum Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang**

Data yang diperoleh dari hasil survey dapat dilihat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam lingkup Polresta Malang di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

## Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2011

No.	Bulan	Jumlah	Korban			Kerugian Materiil
		LAKA	MD	LB	LR	
1	JANUARI	28	11	3	29	Rp 12.600.000,00
2	PEBRUARI	25	8	2	25	Rp 13.500.000,00
3	MARET	45	10	12	56	Rp 36.075.000,00
4	APRIL	35	7	5	37	Rp 15.250.000,00
5	MEI	31	8	2	29	Rp 16.000.000,00
6	JUNI	19	13	-	20	Rp 9.800.000,00
7	JULI	23	4	1	26	Rp 6.100.000,00
8	AGUSTUS	28	12	1	35	Rp16.575.000,00
9	SEPTEMBER	24	7	1	30	Rp 19.350.000,00
10	OKTOBER	33	8	1	40	Rp 27.800.000,00
11	NOPEMBER	15	7	-	19	Rp 17.200.000,00
12	DESEMBER	17	4	-	17	Rp7.100.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>323</b>	<b>99</b>	<b>28</b>	<b>363</b>	<b>Rp 197.350.000,00</b>

*Data Sekunder, diolah, 2014*

Dari tabel di atas, kecelakaan yang terjadi dalam tahun 2011, yaitu sebanyak 323 perkara kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 99 orang, korban luka berat sebanyak 28 orang, korban luka ringan sebanyak 363 orang, dan kerugian materiil sebesar Rp 197.350.000,00.

Tabel 2

## Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2012

No.	Bulan	Jumlah	Korban			Kerugian Materiil
		LAKA	MD	LB	LR	
1	JANUARI	37	10	3	40	Rp 153.700.000,00
2	PEBRUARI	21	6	2	21	Rp 14.750.000,00
3	MARET	24	10	1	22	Rp 17.000.000,00
4	APRIL	18	2	-	26	Rp 13.500.000,00
5	MEI	28	5	1	30	Rp16.800.000,00
6	JUNI	30	7	-	38	Rp 14.100.000,00
7	JULI	31	6	-	33	Rp 16.050.000,00
8	AGUSTUS	25	9	-	27	Rp 30.300.000,00
9	SEPTEMBER	33	7	-	43	Rp 95.100.000,00
10	OKTOBER	25	5	1	28	Rp 23.500.000,00
11	NOPEMBER	19	5	-	27	Rp 16.000.000,00
12	DESEMBER	25	5	-	33	Rp 26.250.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>316</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>368</b>	<b>Rp 437.050.000,00</b>

*Data Sekunder, diolah, 2014*

Dari tabel di atas, kecelakaan yang terjadi dalam tahun 2012, yaitu sebanyak 316 perkara kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 77 orang, dan korban luka berat sebanyak 8 orang, korban luka ringan sebanyak 368 orang dan kerugian materiil sebesar Rp 437,050.000,00.



Tabel 3

## Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2013

No.	Bulan	Jumlah	Korban			Kerugian Materiil
		LAKA	MD	LB	LR	
1	JANUARI	32	11	-	42	Rp26.850.000,00
2	PEBRUARI	17	4	-	22	Rp 9.100.000,00
3	MARET	27	6	-	31	Rp56.500.000,00
4	APRIL	16	4	2	23	Rp 12.800.000,00
5	MEI	16	4	-	26	Rp12.100.000,00
6	JUNI	17	7	-	23	Rp 21.500.000,00
7	JULI	12	3	-	12	Rp 7.200.000,00
8	AGUSTUS	16	5	-	22	Rp 10.950.000,00
9	SEPTEMBER	7	-	-	11	Rp27.000.000,00
10	OKTOBER	22	10	2	21	Rp15.750.000,00
11	NOPEMBER	24	11	1	25	Rp 30.200.000,00
12	DESEMBER	16	5	-	22	Rp 15.300.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>222</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>280</b>	<b>Rp 245.250.000,00</b>

*Data Sekunder, diolah, 2014*

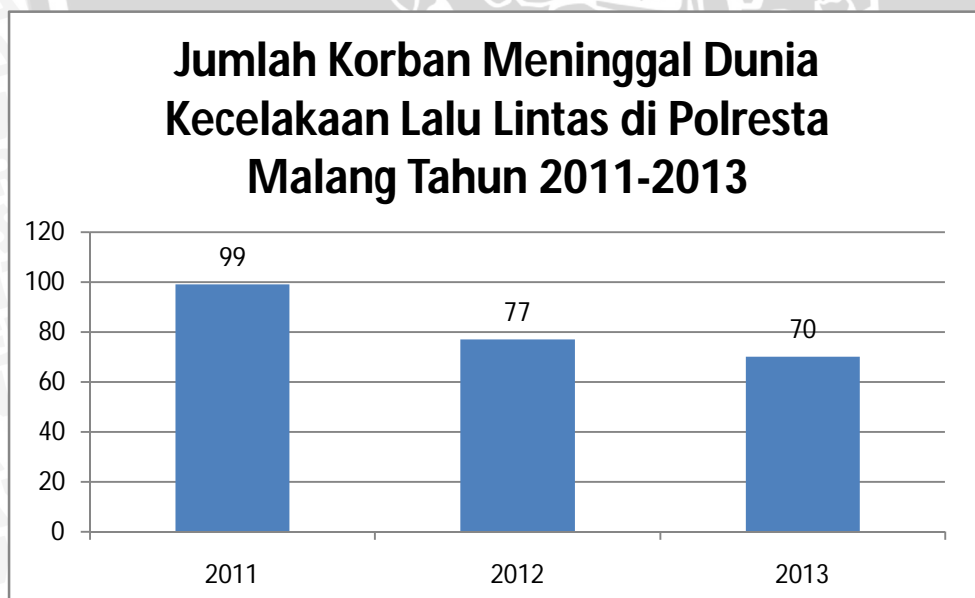
Dari tabel di atas, kecelakaan yang terjadi dalam tahun 2013, yaitu sebanyak 222 perkara kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang, dan korban luka berat sebanyak 5 orang, korban luka ringan sebanyak 280 orang dan kerugian materiil sebesar Rp 245.250.000,00

Berdasarkan ketiga data jumlah perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Malang tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

**Bagan 3**

*Data Sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan bagan diatas jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011 sejumlah 323 perkara. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2012 dengan jumlah kecelakaan lalu lintas 316 perkara, dan kembali menurun pada tahun 2013 dengan jumlah 222 perkara.

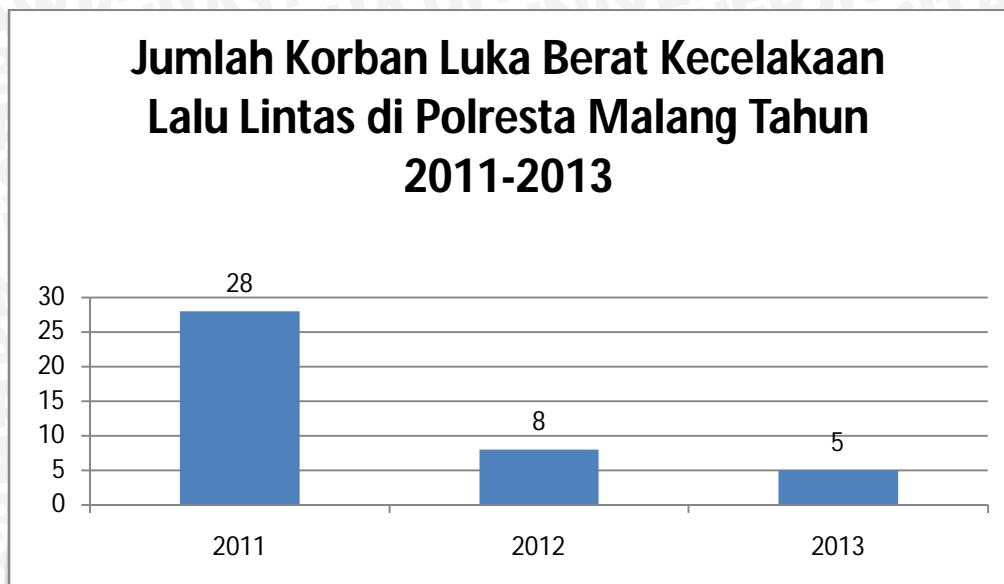
**Bagan 4**

*Data Sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan bagan diatas jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011 sejumlah 99 orang. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2012

dengan jumlah korban meninggal dunia 77 orang, dan kembali menurun pada tahun 2013 dengan jumlah korban meninggal dunia 70 orang.

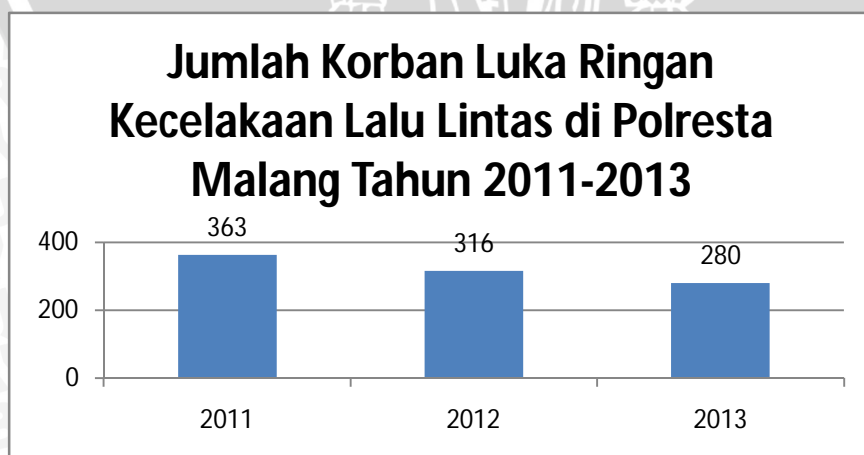
**Bagan 5**



*Data Sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan tabel diatas jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011 sejumlah 28 orang. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2012 dengan jumlah korban luka berat 8 orang, dan kembali menurun pada tahun 2013 dengan jumlah korban luka berat 5 orang.

**Bagan 6**



*Data Sekunder, diolah, 2014*



Berdasarkan tabel diatas jumlah korban luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011 sejumlah 363 orang. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2012 dengan jumlah korban luka berat 316 orang, dan kembali menurun pada tahun 2013 dengan jumlah korban luka berat 280 orang.

#### **D. Kriteria Penggunaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan**

Diskresi adalah kebijaksanaan kepolisian dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri. Salah satu perwujudan kewenangan diskresi kepolisian adalah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.

Walaupun setiap penyidik kepolisian memiliki kewenangan dikresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, namun tidak berarti penyidik kepolisian dapat bertindak semena-mena tanpa mengindahkan norma agama, norma sosial maupun norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kriteria-kriteria penggunaan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Kecelakaan lalu lintas tersebut bukan merupakan tindak pidana kesengajaan.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Rudy Hidajanto, Rabu, tanggal 26 Februari 2014

Anggota kepolisian lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas terlebih dahulu melihat sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan memeriksa saksi, memeriksa tersangka, dan melakukan gelar perkara sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Penyidik dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus di bidang lalu lintas karena penyidik dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan perkara dengan tepat.

Apabila dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan kealpaan pelaku, maka dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun sebaliknya apabila menurut penyidik penyebab kecelakaan lalu lintas adalah akibat kesengajaan pelaku dan/ atau pelaku terlebih dahulu melanggar ketentuan perundang-undangan (pelaku dalam pengaruh alkohol, motor tidak standar), maka polisi selaku penyidik tidak dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan dan akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan, walaupun sebelumnya telah ada itikad baik dari pelaku maupun korban untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Bentuk kesengajaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Pelaku kecelakaan lalu lintas mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaanya yang merupakan suatu tindak pidana serta sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.



Kesengajaan dengan kemungkinan terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawaban oleh si pelaku.

2. Adanya itikad baik dari pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Itikad baik merupakan sikap batin atau perilaku jiwa untuk sama-sama mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Pihak korban sesuai hasil penyidikan yang ada memberi maaf kepada pelaku, meyakini bahwa tidak ada unsur kesengajaan serta menerima sebagai musibah perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dan pihak pelaku dalam pemeriksaan beritikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang ganti kerugian sebagai uang duka, biaya selamatan maupun kesepakatan-kesepakatan lain. Kesepakatan antara pelaku dengan korban merupakan syarat ketika kepolisian menggunakan kewenangan diskresinya untuk memberikan pertimbangan menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan. Kesepakatan antara pelaku dengan korban diwujudkan dengan dibuatnya surat kesepakatan damai yang berisi pernyataan antara kedua belah pihak bahwa perkara kecelakaan lalu lintas telah selesai secara kekeluargaan dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari. Surat kesepakatan damai tersebut berisikan klausula-klausula yang telah disepakati masing-masing pihak yang berperkara, kemudian surat tersebut ditandatangani antara pelaku dengan korban beserta saksi-saksi diatas materai yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat.



Kedua kriteria yang diterapkan oleh Polresta Malang bersifat saling melengkapi.

Dalam hal ini apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka kepolisian Polresta Malang tidak dapat menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebagai wujud dari diskresi kepolisian.

#### **E. Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan**

##### **1. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2013.**

Data yang diperoleh dari hasil survei dapat dilihat jumlah kecelakaan yang terjadi dalam lingkup Polresta Malang beserta dengan penyelesaiannya pada tahun 2013 adalah sebagai berikut

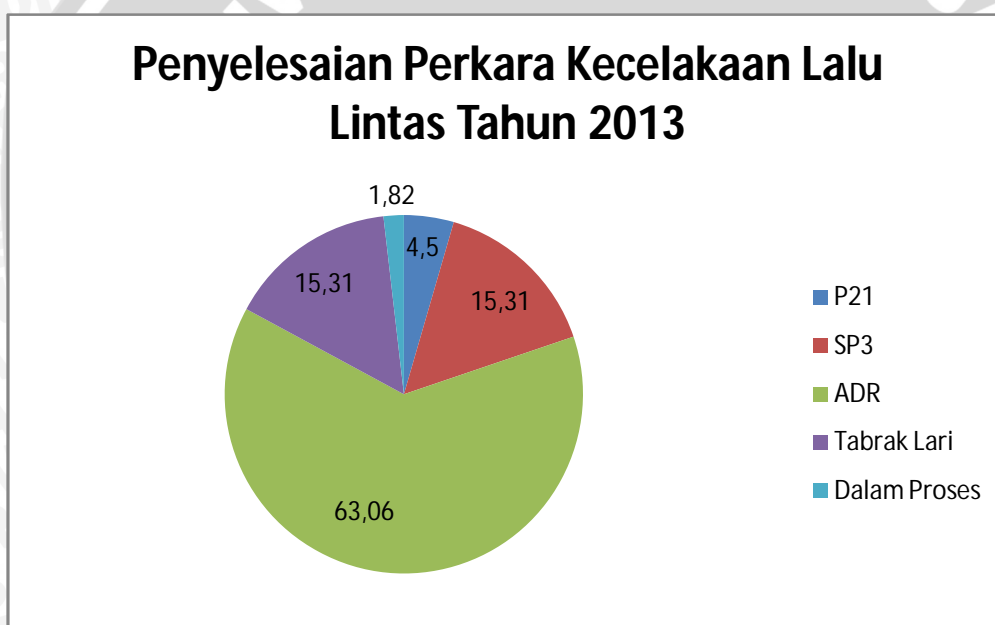
**Tabel 4**  
**Jumlah Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang**  
**Tahun 2013**

NO	BULAN	KASUS LAKA	KORBAN / KERMAT			SELRA			TUNGGAKAN	
		BULAN INI	MD	LB	LR	P21	SP3	ADR	TABRAK LARI	DLM PROSES
1	JANUARI	32	11	0	42	2	9	15	6	0
2	PEBRUARI	17	4	0	22	0	3	11	3	0
3	MARET	27	6	0	31	1	5	17	4	0
4	APRIL	16	4	2	23	1	2	9	4	0
5	MEI	16	4	0	26	1	2	11	2	0
6	JUNI	17	7	0	23	1	4	8	4	0
7	JULI	12	3	0	12	0	3	9	0	0
8	AGUSTUS	16	5	0	22	1	2	10	3	0
9	SEPTEMBER	7	0	0	11	0	0	6	1	0
10	OKTOBER	22	10	2	21	1	0	14	7	0
11	NOPEMBER	24	11	1	25	2	4	16	0	2
12	DESEMBER	16	5	0	22	0	0	14	0	2
		<b>222</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>280</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>140</b>	<b>34</b>	<b>4</b>
						<b>4,5%</b>	<b>15,31%</b>	<b>63,06%</b>	<b>15,31%</b>	<b>1,82%</b>

*Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan tabel di atas, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 222 perkara dengan korban meninggal dunia 70 orang, korban luka berat 5 orang dan luka ringan 280 orang. Dari jumlah kecelakaan tersebut, 10 perkara dilimpahkan ke kejaksaan (P21), 34 perkara dihentikan proses penyidikannya (SP3), sebanyak 140 perkara diselesaikan menggunakan diskresi kepolisian yang diwujudkan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan (ADR).

**Bagan 7**



*Data sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan bagan diatas, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013 di Polresta Malang 4,5% dilimpahkan ke kejaksaan (P21), 15,31% perkara dihentikan proses penyidikannya (SP3), 1,82% masih dalam proses penyidikan, 15,31% merupakan perkara kecelakaan tabrak lari, dan 63,06% diselesaikan melalui jalur ADR yang merupakan perwujudan dari diskresi kepolisian.

Berdasarkan perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013 yang diselesaikan melalui mekanisme ADR sejumlah 140 perkara, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

**Bagan 8**

**Jumlah Penyelesaian Perkara  
Kecelakaan Lalu Lintas di Luar  
Pengadilan (ADR) Berdasarkan Kriteria  
Korban Tahun 2013**



*Data Sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan bagan di atas, dari 140 perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013 yang diselesaikan di luar pengadilan (ADR), terdiri dari 11 perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, 4 perkara yang mengakibatkan korban luka berat, dan 125 perkara yang mengakibatkan korban luka ringan.

## **2. Mekanisme dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan.**

Pelaksanaan diskresi pada saat penyidikan tentunya mempunyai pola dan bentuk tersendiri yang dipengaruhi oleh perkara, keadaan sosial, ekonomi, budaya setempat, situasi dan kondisi maupun keadaan dari pelaku maupun korban. Penerapan



kewenangan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas secara implisit diatur dalam Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat Kapolri tersebut mengatur hal-hal pokok antara lain :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Selaras dengan Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute*

*Resolution*(ADR), Kapolri menerbitkan Peraturan Kapolri no. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas pasal 63 yang berbunyi :

- (1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- (2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan damai.
- (3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan kepolisian.
- (4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.
- (5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana diatur pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Kedua peraturan tersebut yang menjadi landasan anggota kepolisian Polresta Malang untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan perkara kecelakaan lalu lintas sebagai perwujudan salah satu kewenangan diskresi kepolisian.<sup>59</sup> Peraturan tersebut secara tegas mengatur bahwa penyelesaian di luar pengadilan hanya boleh dilakukan jika mengakibatkan korban luka ringan dan/atau yang mengakibatkan kerugian materi kecil. Namun demikian berdasarkan kebijakan dari Polresta Malang mengizinkan adanya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan walaupun mengakibatkan korban luka berat dan korban mati yang

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Teddy Harianto, Rabu, 26 Februari 2014



tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dan melewati mekanisme-mekanisme tertentu.<sup>60</sup>

Mekanisme dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan penerapannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu<sup>61</sup> :

- a. Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebelum diterbitkan laporan kepolisian.

Dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas terbatas kepada korban yang mengalami luka ringan atau kerugian materiil sedikit. Mekanisme penyelesaian dalam perkara ini adalah penyidik kepolisian mempertemukan pelaku dengan korban terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih. Jika antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai, pelaku bersedia mengganti kerugian materiil maupun immateriil, maka dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan dimana korban tinggal. Kemudian penyidik mencatat perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan di datakan dengan baik. Namun ketika pelaku maupun korban tidak menemukan kata sepakat, maka perkara tersebut dilanjutkan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam undang-undang.

- b. Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas setelah diterbitkan laporan kepolisian.

Dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia. Mekanisme penyelesaian perkaranya adalah pertolongan pertama terhadap korban dengan membawa korban ke rumah sakit, selama

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Teddy Harianto, Rabu, 26 Februari 2014

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Rudy Hidajanto, , tanggal 26 Februari 2014



perawatan dimungkinkan terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban dan/atau ahli waris korban terkait dengan upaya damai atau menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut di luar pengadilan. Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan dimana korban tinggal. Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar perkara yang dipimpin oleh Wakapolresta dan dihadiri oleh Kasat Lantas, Kasat Intel, Kasat Serse, Provos, Kanit Laka, dan penyidik Laka. Masing-masing peserta gelar perkara menyampaikan pendapatnya terkait dengan hasil gelar perkara dan hasilnya dikirim ke Kapolresta sebagai bahan untuk mengambil keputusan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan atau tetap melalui tahap sistem peradilan pidana. Apabila Kapolresta berdasarkan fakta dan pendapat dari peserta gelar perkara mengizinkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, maka penyidik tetap menyelesaikan berita acara pemeriksaan dengan lengkap dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak dikirim ke penuntut umum. Kemudian penyidik mencatat perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan di datakan dengan baik.

Pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar

pengadilan. Selain itu anggota kepolisian tidak boleh intervensi terkait dengan isi klausula-klausula yang disepakati masing-masing pihak.<sup>62</sup>

### **3. Faktor Pendorong Penyidik Menggunakan Kewenangan Diskresi dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan**

Penyidik Polresta Malang menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan lebih dari 60% pada tahun 2013. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong sehingga penyidik kepolisian menggunakan kewenangan diskresi. Faktor-faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebagai berikut<sup>63</sup>:

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian.**

Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan merupakan faktor yang mendukung penyidik menggunakan diskresinya. Walaupun peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci, namun dapat menjadi pedoman bagi penyidik untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan diskresinya dengan melihat situasi dan kondisi lapangan serta memperhatikan norma agama, norma sosial, maupun norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui diskresinya.

##### **2) Instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan.**

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Teddy Harianto, Rabu, 26 Februari 2014

<sup>63</sup> Hasil wawancara Bpk. Edward Rudolf, 18 Februari 2014



Penyidik kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari perintah atau arahan dari pimpinan. Pimpinan kepolisian pasti lebih memiliki pengalaman dan kewenangan sehingga penyidik ketika menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas meminta arahan atau pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih, dalam hal ini terkait dengan perkara kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau korban mati. Pimpinan kepolisian yang memutuskan penyelesaian yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan pendapat peserta gelar perkara.

b. Faktor Eksternal

- 1) Dukungan dari tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan.

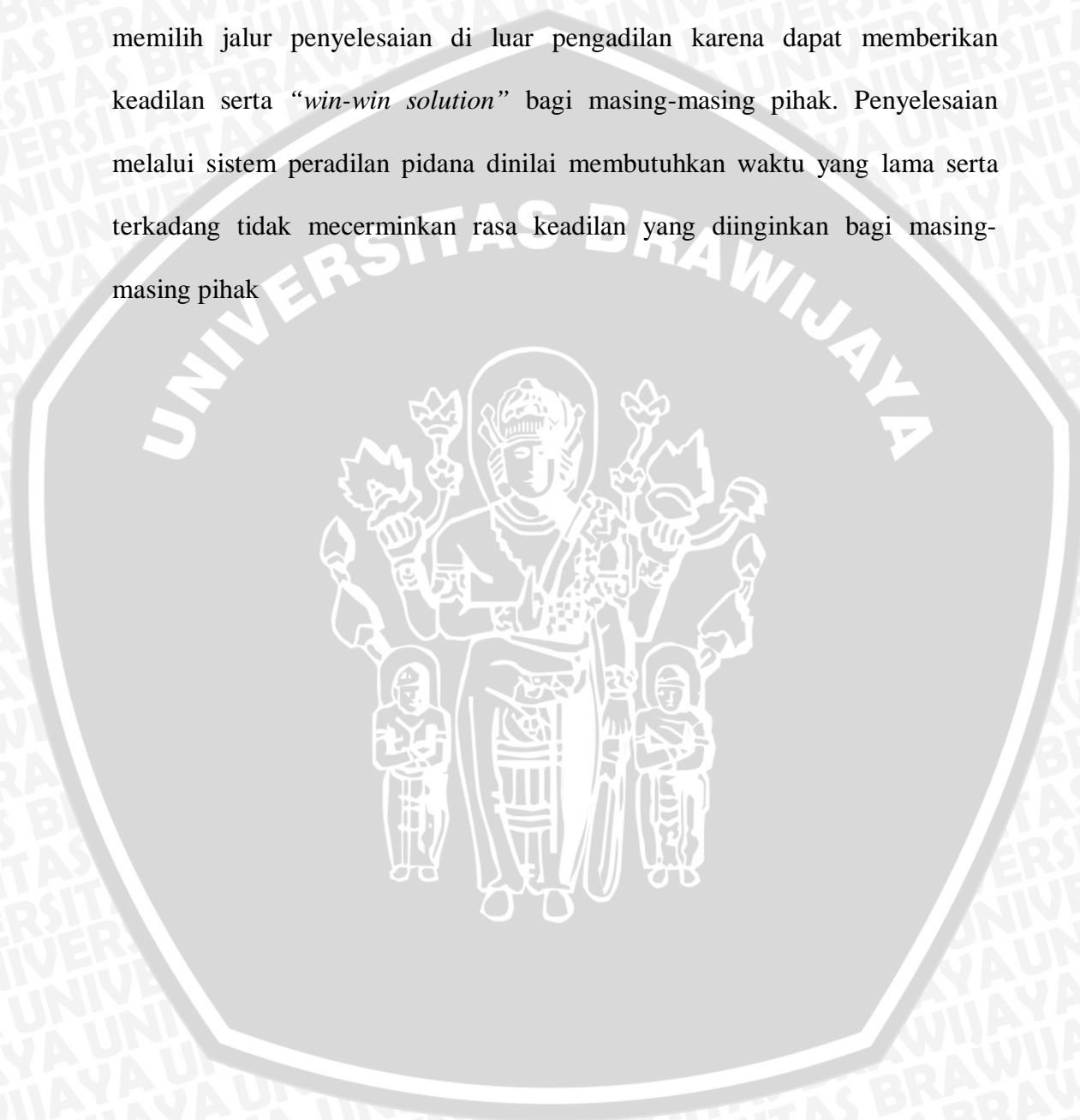
Dukungan masyarakat dalam hal ini adalah ketua RT/ ketua RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan maupun tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Tokoh masyarakat berperan untuk memberikan pendapat-pendapat maupun masukan manakala antara pihak tersangka dan korban bermusyawarah untuk mencari penyelesaian perkara kecelakaan yang terbaik bagi para pihak. Pendapat tokoh masyarakat dijadikan salah satu pertimbangan penyidik dalam menggunakan diskresinya, hal ini terkait apakah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melanggar norma-norma maupun kebiasaan daerah setempat.

- 2) Budaya dari tempat tinggal korban untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan.

Keseluruhan nilai-nilai atau norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi kepolisian menggunakan diskresinya. Penyidik kepolisian cenderung lebih dapat menerima dan tidak memaksakan



menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme peradilan pidana serta menggunakan diskresinya dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sesuai dengan norma yang tumbuh dalam masyarakat tanpa mengabaikan hukum positif yang berlaku. Masyarakat lebih memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan karena dapat memberikan keadilan serta “win-win solution” bagi masing-masing pihak. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana dinilai membutuhkan waktu yang lama serta terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan bagi masing-masing pihak



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kriteria penggunaan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan antara lain :
  - a. Kecelakaan lalu lintas tersebut bukan merupakan tindak pidana kesengajaan.
  - b. Adanya itikad baik dari pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.
2. Implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan di luar pengadilan di Polresta Malang diwujudkan dengan diselesaikannya 140 perkara dari 222 perkara kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian / jalur di luar pengadilan, dari 140 perkara yang diselesaikan di luar pengadilan tersebut 11 perkara mengakibatkan korban meninggal dunia, 4 perkara mengakibatkan korban luka dan 125 perkara mengakibatkan korban luka ringan, ada dua mekanisme untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan yaitu sebelum diterbitkan laporan kepolisian dan sesudah diterbitkan laporan kepolisian, serta adanya faktor-faktor pendorong anggota kepolisian untuk menggunakan kewenangan diskresi dari internal kepolisian yaitu adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dan instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan serta faktor eksternal kepolisian yaitu dukungan dari tokoh masyarakat setempat dan budaya dari tempat tinggal korban untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan.

## B. Saran

### 1. Bagi Kepolisian

Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian selain bertujuan untuk mencapai tujuan hukum melainkan juga untuk efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara pidana. Walaupun kewenangan diskresi kepolisian begitu luas, namun dalam penerapannya tidak boleh sewenang-wenang dan tetap memperhatikan norma-norma maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan pengawasan secara berkala oleh pihak kepolisian terkait dengan jika adanya oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan diskresi tersebut.

### 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kewenangan diskresi merupakan sebagian dari lingkup kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bukan berarti ketika kepolisian menggunakan kewenangan diskresi lantas kepolisian tidak menegakkan hukum dan tidak menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini diperlukan peran serta masyarakat untuk menciptakan keteraturan hukum dan ketertiban masyarakat serta turut mengawasi apabila ada penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arief Barda Nawawi, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , **Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan**, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bisri Ilham, **Sistem Hukum Indonesia**, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Djoko Prakoso, **Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa**. Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- Indarti Erlyn. **Diskresi Polisi**, Badan Penerbit Undip. Semarang, 2002.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, **Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Mabes Polri, **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan**, Jakarta, 2002.
- M. Faal, **Penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi kepolisian)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Pustaka Kartini, Jakarta, 2006.
- Puspa Yan Pramadya, **Kamus Hukum**. Aneka Ilmu, Semarang, 1997.
- Raharjo Sajipto & Tabah Anton, **Polisi Pelaku dan Pemikir**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal**, Politeia, Bogor, 1980.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- R. Wiyono, **Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006.
- Setijowarno D, Frazila R.B, **Pengantar Sistem Transportasi**, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2001.

- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, **Manajemen Penelitian**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid I**, Andi Offset, Yogyakarta, 1981.
- Suyud Margono, **ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- W.J.S. Purwodarminto. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta, 1986.
- Van Vollenhallen dalam Warsito Hadi Utomo, **Hukum Kepolisian di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisir, jakarta 2005.
- Yong Ohoitumur, **Teori Etika Tentang Hukuman Legal**, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1997.

## KORAN

- Iswanto, **Penyelesaian Damai Perkara Lalu – Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana**, Yogya Post, 5 November 2005.

## UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia
- Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tentang Penanganan Perkara Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).
- Peraturan Kapolri no. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

## SKRIPSI

- Kartika, M. 2009. **Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Depok Tahun 2008**. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia : Jakarta. Diakses melalui [www.digilib.ui.ac.id](http://www.digilib.ui.ac.id) pada tanggal 11 Desember 2013 jam 16.30

## INTERNET

- Andi Munwarman. **Sejarah singkat POLRI**. <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal (27 April 2013)

D-13, 2013, **Kecelakaan Penyebab Kematian Ketiga Terbesar di Indonesia**(online),  
<http://www.beritasatu.com/nasional/100328-kecelakaan-penyebab-kematian-ketiga-terbesar-di-indonesia.html>, (21 September 2013)

New York State Dispute Resolution Association, Inc., “**Alternative Dispute Resolution in New York State**”, [http://www.ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr\\_pol\\_en.html](http://www.ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_pol_en.html), (11 Desember 2013)





**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Bram Dhananjaya

NIM : 105010101111006

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum skripsi ini adalah hasil karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang menyatakan,

Bram Dhananjaya

NIM. 105010101111006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bram Dhananjaya  
NIM : 105010101111006  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana  
Jenis Karya : Skripsi / Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Noneksklusif Royalty Free Right) atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI POLRESTA MALANG)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang  
Pada Tanggal : 5 Juli 2014

Yang menyatakan,

(Bram Dhananjaya)